

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pemerintah dan pembangunan daerah ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang baik. Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan dilakukan secara bersih (*clean government*). Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah mendorong untuk meningkatkan pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen berupa laporan keuangan yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2005). Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) terdiri dari, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintahan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintah daerah serta dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Nordiawan, 2009:25).

Pemanfaatan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna. Sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang mengerti dan memahami proses dan pelaksanaan akuntansi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Aprianti dan Sudaryati (2019) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Seseorang harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta kompetensi yang lain untuk diperlukan melaksanakan tugas secara efektif dan membuat kinerja yang baik. Selanjutnya, menurut Pradono dan Basukianto (2015), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bakal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Selain sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik, Sistem Pengendalian Internal diperlukan untuk mendukung terciptanya kualitas dan keyakinan yang memadai atas informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem pengendalian internal meliputi

keseluruhan organisasi dan semua kebijakan atau ketentuan organisasi yang telah dikoordinasikan untuk melindungi harta, mempertahankan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mengendalikan kegiatan internal.

Penyusunan LKPD harus berdampingan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebelum diserahkan BPK, LKPD akan dikaji ulang oleh rapat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat tersebut adalah inspektorat Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati, *et. al* (2014) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan hasil positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka penelitian ini akan meneliti lebih lanjut bagaimana peranan variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya

pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penambahan variabel sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah pada penelitian ini adalah karena berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal turut serta meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. Adanya sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Pemilihan pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai sampel penelitian dikarenakan subjek merupakan tempat yang sensitif dalam menerima atau menghimpun dana masyarakat yang bersumber dari pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dari adanya pengawasan berkala yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk memperoleh keyakinan yang memadai dari pelaksanaan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dari penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksplanatori. Total sampel dari penelitian ini adalah 76 pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Data yang telah diperoleh diolah menggunakan software SPSS 18. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda. Sementara pengujian hipotesis dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji parsial  $t$ , dan uji  $F$ .

#### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.6 Kontribusi Riset**

##### **1.6.1 Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini mendukung teori *stakeholders* yang dalam hal ini mampu menjelaskan peran kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung atau sebagai bahan untuk mengkritisi penelitian terkait kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan kualitas laporan keuangan.

### **1.6.2 Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memperhatikan variabel-variabel yang berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga diharapkan akan tercapainya pemenuhan tujuan organisasi menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima ((5) bab, antara lain :

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, antara lain kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah serta kualitas laporan keuangan. Selain itu, dalam bab ini juga akan dikemukakan tinjauan penelitian yang dilakukan sebelumnya, hipotesis, dan model analitis.

#### **BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang akan digunakan, disertai dengan indentifikasi variabel, definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, populasi dan

sampel, periode pengamatan, serta teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis.

#### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, analisis karakteristik responden dan analisis deskriptif kuesioner, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil dan pembahasan penelitian juga berisi saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.